Media: Joglo Jogja Hari: Jumat Tanggal: 10 April 2026 Halaman: 1

PROGRAM

Hari Ini, Pemkot Mulai Terapkan WFH

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* – Mulai hari ini (10/4) setiap hari Jumat, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memberlakukan kebijakan *Work From Home* (WFH) atau bekerja dari rumah bagi para pegawai. Langkah itu diambil sebagai strategi *plafonnisasi* untuk menekan anggaran belanja bahan bakar minyak (BBM) di lingkup pemerintah daerah.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengungkapkan kebijakan itu menyasar para staf yang selama ini mayoritas menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilisasi ke kantor. Dengan bekerja dari rumah, diharapkan konsumsi BBM secara kolektif dapat menurun drastis sesuai dengan harapan pemerintah pusat.

Baca **HARI** ... Hal II

Hari Ini, Pemkot Mulai Terapkan WFH

sambungan dari hal Joglo Jogja

"Jajaran pimpinan tidak ada yang WFH dan tetap di kantor, yang boleh WFH itu stafnya. Di Kota Jogja ini staf pakai kendaraan sendiri, jadi kalau mereka di rumah, belanja BBM-nya bisa turun," ujar Hasto saat ditemui di Balai Kota, Kamis (9/4).

Meski bekerja dari rumah, Hasto menegaskan bahwa sistem pengawasan dilakukan secara ketat dan digital. Setiap pegawai wajib mengisi rencana kerja melalui *Google Form* dengan durasi kerja tetap 5,5 jam. Rencana tersebut mencakup rincian aktivitas dari jam ke jam yang harus disetujui oleh atasan langsung di sore hari.

Untuk memastikan koordinasi tetap berjalan, para pimpinan yang berada di kantor diwajibkan melakukan koordinasi melalui Zoom setiap pagi.

"Pagi harus nge-Zoom dulu untuk arahan. Sorenya mereka mengembalikan form laporan hasil kerja. Jadi produktivitas harus tetap efektif dan efisien," jelasnya.

Disinggung mengenai potensi penyalahgunaan waktu WFH untuk keperluan pribadi seperti berekreasi atau ke mal, Hasto memberikan peringatan keras. Ia menyebut sistem pelaporan per jam akan mendeteksi jika ada pegawai yang tidak bekerja sesuai rencana.

"Kalau ada yang bolos tanpa izin atau tidak bekerja sesuai laporan, saya hitung diskualifikasi. Hari itu dianggap tidak masuk," tegas Hasto.

Sanksi yang diberikan akan mengikuti ketentuan yang berlaku, mulai dari teguran ringan hingga teguran berat. Jika pelanggaran dilakukan berulang kali.

Kebijakan ini akan mulai diuji coba secara efektif pada Jumat ini. Hasto menyadari bahwa pada tahap awal mungkin akan ada kendala teknis atau adaptasi dari para pegawai. "Ini baru pertama, mungkin awal-awal masih agak gagap, tapi lama-lama saya yakin akan lancar," pungkasnya. **(eri/bid/wa)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005